

# **BI Rate: Menguji Kepiawaian Bank Sentral**

( 13 Sep 2005)

Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam suatu perekonomian. Peranan tersebut tercermin pada kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, seringkali hal-hal ini menjadi sasaran akhir kebijakan moneter.

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.

Bank Sentral telah mengumumkan kebijakan baru di bidang moneter dan perbankan, yaitu mengenai implementasi suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dalam kerangka Inflation Targeting dan proses percepatan konsolidasi perbankan (Berkaitan dengan UU No.3 tahun 2004 yang merupakan amandemen terhadap UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Upaya Bank Indonesia untuk menjaga inflasi pada tingkat yang kondusif guna mempercepat gerak roda perekonomian melalui inflation targeting memerlukan dukungan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Inilah kebijakan moneter yang baru, yaitu Inflation targeting framework (ITF) yang menggantikan cara lama yang dipakai selama ini dalam kebijakan moneter dalam pencapaian tingkat inflasi nasional, yaitu dengan acuan lelang (SBI) yang bertumpu pada target penarikan jumlah uang beredar (base money).

Beberapa konsep dasar dalam Inflation Targeting Framework adalah sebagai berikut:

## **Sasaran Inflasi**

ITF dimulai dengan penetapan dan diumumkannya sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral. Penetapan sasaran inflasi tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro, terutama social loss 'kerugian sosial' akibat adanya 'trade off' antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, selain itu, beberapa faktor penting lain yang juga diperhatikan terutama dalam hal jangka waktu.

## **Forward looking**

Rentang waktu mengenai seberapa lama ke depan sasaran inflasi ingin ditetapkan akan tergantung dari tenggat waktu, karena langkah ini bersifat antisipatif, bukan reaktif, atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan datang dibandingkan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

## **Transparansi**

Penerapan ITF ini akan menuntut transparansi (keterbukaan) yang tinggi dari bank sentral. Hal ini karena salah satu kunci sukses penerapan sistem ini terletak pada transparansi bank sentral dalam mengambil kebijakan moneter. Hal ini diperlukan agar ekspektasi inflasi masyarakat yang terbentuk sesuai dengan yang diinginkan

oleh bank sentral. Bentuk transparansi dapat diwujudkan melalui penjelasan bank sentral kepada publik secara periodik mengenai perkembangan ekonomi terkini, proyeksi inflasi, dan kebijakan yang diambil untuk menjaga laju inflasi tetap pada jalurnya.

### **Akuntabilitas dan Kredibilitas**

Dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit kepada publik berarti melekat akuntabilitas, karena pada akhirnya bank sentral harus mempertanggung jawabkan target tersebut kepada publik. Kredibilitas bank sentral dengan demikian akan sangat tergantung pada komitmennya dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan.

Selama ini BI telah menerapkan kerangka kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan dilakukan secara transparan. Namun dalam prakteknya BI masih menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Menyadari semakin sulitnya upaya mengendalikan uang primer sebagai dampak dari berbagai kemajuan yang dicapai oleh sektor keuangan, maka mulai bulan Juli ini BI akan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasi moneter. Dengan demikian BI akan menggunakan BI rate yang akan diumumkan pada setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Triwulanan. Dengan demikian, ada 3 prinsip dasar penyempurnaan framework, yaitu Pertama, BI akan menggunakan suku bunga (BI rate) sebagai sasaran operasional menggantikan base money. Kedua, kebijakan moneter akan dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, BI akan melakukan penguatan mekanisme perumusan dan pengambilan kebijakan moneter.

Dewan Gubernur memandang penetapan suku bunga tersebut dapat mengendalikan tingkat inflasi ke arah sasaran inflasi jangka menengah sekaligus kondusif untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dewasa ini. Suku bunga tersebut akan berlaku selama triwulan III-2005, namun tanpa menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian pada bulan-bulan mendatang sejalan dengan perkembangan perekonomian dan kondisi moneter secara keseluruhan.

Inflation Targeting merupakan kerangka kebijakan moneter yang relatif baru digunakan. Kerangka kerja kebijakan moneter ini pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990, dan semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lain yang menghadapi masalah dalam penerapan kebijakannya, selain itu, kerangka kerja Inflation Targeting diyakini membantu bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu. Ciri-ciri utama dari Inflation Targeting adalah pernyataan resmi dari bank sentral bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Pengumuman tersebut mengandung arti bahwa bank sentral memberikan komitmen dan jaminan kepada publik bahwa setiap kebijakannya selalu mengacu pada pencapaian target tersebut, dan bank sentral mempertanggung jawabkan kebijakannya apabila target tersebut tidak tercapai.

Jadi ekspektasi inflasi bukan lagi melihat kebelakang, tetapi mengacu pada sasaran ke depan (forward looking), yaitu sasaran BI Rate secara triwulanan yang diumumkan di awalnya. Sebagai contoh untuk BI Rate perdana periode Juli hingga Agustus tahun ini sudah dipatok oleh bank sentral sebesar 8,5%, maka ekspektasi pasar terhadap lelang SBI akan dikelola berkisar antara 25 basis point, karena BI Rate dapat bergerak mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap seperti awal

ditetapkan. Dengan BI Rate juga memungkinkan floating bunga lelang SBI hanya pada kisaran basis poin tersebut. Tetapi jika kemudian perkembangan pasar menjadi tidak terbandung, maka mekanisme RDG bulanan bisa menetapkan kenaikan atau menekan bunga panduan (BI Rate) dengan ruang perubahan kelipatan 25 basis poin.

Sekarang ini dengan kebijakan uang ketat BI, maka dari sepuluh langkah yang dilakukan, salah satunya adalah dengan menaikkan BI rate menjadi 9,5 persen, kemudian bertambah lagi menjadi 10 persen.

Dengan model seperti ini, maka perkembangan tingkat suku bunga akan sangat bergantung pada kepercayaan pasar terhadap kredibilitas BI. Semakin tinggi tumbuh kepercayaan pasar maka akan semakin mudah mengontrol suku bunga melalui BI Rate tersebut.

Di sisi lain dengan BI Rate akan lebih mudah mengontrol aksi spekulasi di pasar uang, lelang SBI, serta PUAB. Dengan kata lain BI Rate akan memandu tingkat bunga lelang SBI dan PUAB dalam jangka cukup panjang, maka peluang untuk berspekulasi relatif lebih sulit, terutama bagi investor pemilik dana dalam jumlah besar yang mampu menggoyang pasar dengan mencari keuntungan sesaat melalui transaksi overnight.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat, kebijakan moneter akan dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas Laporan Kebijakan Moneter (Monetary Policy Report) secara triwulanan.

Dengan demikian, tanpa adanya sistem perbankan yang sehat, tidak mungkin kebijakan moneter dapat dilakukan secara efektif. Begitu juga sebaliknya, stabilitas moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Efektif atau tidaknya kebijakan ini baru akan terlihat dalam jangka waktu tahunan. Sejauh mana kepiawaian dalam membuat sasaran BI Rate sejalan dengan harapan dan perkembangan pasar sehingga sinyal itu menjadi pegangan kuat bagi perencanaan dan aksi pasar.

*Sumber : Anas Iswanto Anwar, Dosen FE-Unhas*